

PEMIKIRAN POLITIK USTADZ ABDULLAH SUNGKAR

Oleh : Muh. Nursalim*

Abstract

This paper is the result of research on the political thought of Abdullah Sungkar. The data found through the observation on his recording of his religious proselytizing in many places, whether before his going to Malaysia or when he was been there. Other side, it found by the interview with some of his colleagues. The last one is to find the data about his life. The result of this research expresses that the person tends to have the literalism view in understanding the sacred text (al-Qur'an). This kind of view has influenced on his political thought, for instance he refuses nationalism and democracy and puts on the obligation of standing of Islam Syari'ah.

خلاصة

إن هذه المقالة تعتبر حاصل بحث حول الفكر السياسي لشيخ المرحوم "عبدالله سونكار" البيانا التي قد قام الباحث بجمعها من خلال فحص الشرائط المسجلة للخطب التي قام المرحوم بإلقائها قبل رحيله إلى ماليزيا وفي فترة إقامته هناك، وبالإضافة إلى ذلك قد اعتمد الباحث على حاصل المقابلات الشخصية مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالمرحوم من أجل الحصول على معلومات حول السيرة الذاتية. نتيجة هذا البحث قد وضحت بأن المرحوم كان متأثرا في طريقة التفسير الحرفي للنص وخصوصا آيات القرآن الكريم. هذه الطريقة التي قد أظهرت تأثيرها العميق في مفهومه السياسي وذلك من خلال رفضه القاطع للوطنية و الديمقراطية ووجوب التحول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء.

Kata Kunci: *Tauhid, Penegakkan Syari'at Islam, Abdullah Sungkar*

*Alumni Pondok Pesantren 'Al Mukmin Ngruki Solo, sekarang Mahasiswa Program Doktor pada PPS IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

A. Pendahuluan

Kematiannya barangkali sebuah anugerah Allah yang diberikan kepadanya. Sebab seandainya tokoh ini masih hidup, bukan Abu Bakar Ba'asyir yang dikejar-kejar Amerika dan Polisi Republik Indonesia tetapi Abdullah Sungkarlah target utamanya.

Bila Indonesia punya dwi tunggal proklamator yaitu Sukarno-Hatta, maka (Pondok Pesantren) Al Mukmin Ngruki memiliki dwi tunggal dalam memperjuangkan syari'ah Islam yaitu Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Kedua tokoh tersebut senasib seperjuangan. Mereka dipenjara penguasa Orde Baru dalam kasus yang sama yaitu menentang asas tunggal, lalu merekapun sama-sama hijrah ke Malaysia menjadi pelarian politik.

Sudah sejak lama kota Solo Jawa Tengah menjadi laboratorium politik nasional dan sejak reformasi digulirkan fenomena tersebut semakin menarik. Di kota kecil itu berkembang kelompok politik yang cenderung kekiri-kirian dan pada saat yang sama kelompok kanan semakin mengental. Abdullah Sungkar adalah termasuk salah satu yang terakhir.

Apakah pemikiran tokoh ini dapat diidentikkan dengan pemikiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir? Sama persis tentu saja tidak. Tetapi sebagai entri untuk mengetahui pemikiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir mungkin dapat dipertimbangkan

B. Riwayat Hidup Ustadz Abdullah Sungkar

Masyarakat muslim terutama yang tinggal di kota Solo sering salah paham jika menyebut nama Abdullah Sungkar. Di kota ini memang terdapat dua Abdullah Sungkar yang keduanya sama-sama terkenal dan mereka masih memiliki hubungan kerabat. *Pertama* adalah Abdullah bin Ahmad Sungkar yang sering disingkat AS dan *kedua* adalah Abdullah bin Muhammad Sungkar yang biasa disingkat MS. Tokoh yang menjadi kajian penulis adalah Abdullah bin Ahmad Sungkar, adapun Abdullah bin Muhammad Sungkar yang juga sering diberi gelar Abdullah Babon adalah seorang pengusaha tekstil yang saat ini tinggal di kampung Kedung Lumbu RW IV, Pasar Kliwon, Solo.¹

Ahmad Sungkar - bapaknya AS - merupakan imigran dari Hadramaut. Sebelum kepindahannya ke Indonesia ia pernah menikah dengan wanita Arab dan sempat dikaruniai seorang anak. Setelah berada di Indonesia, Ahmad

¹Di kalangan orang-orang keturunan Arab, *laqab* (julukan) sering lebih dikenal daripada nama aslinya. Abdullah bin Muhammad Sungkar mendapat *laqab* "babon" karena ia memiliki fisik besar dengan perut gemuk.

Sungkar menikah dengan seorang wanita Jawa asal Jombang. Dari pernikahan inilah lahir Abdullah Sungkar. Tokoh kajian ini merupakan anak tunggal dari kedua pasangan Arab-Jawa tersebut, karena itu Abdullah Sungkar di Indonesia tidak memiliki saudara, akan tetapi di Arab Saudi dia memiliki saudara seayah. Dalam perjalanan perjuangan AS, saudara seayah di Saudi itulah yang turut menopang dana, termasuk ketika AS berada di persembunyiannya di Malaysia.

1. Masa kecil dan pendidikan

Abdullah Sungkar Lahir sebagai warga negara Indonesia di kota Solo tahun 1937. Dari segi ekonomi orang tuanya hidup dalam kesederhanaan, tetapi aspek pendidikan terutama pendidikan agama, Abdullah Sungkar kecil sangat beruntung, karena selain tinggal di lingkungan religius (kampung Arab), orang tuanya sangat menekankan satu masalah tersebut. Itulah sebabnya AS belajar formal mulai Taman Kanak-kanak sampai SLTA selalu di lembaga pendidikan Islam. TK dan SD sekolah di Al Irsyad, SMP dilangsungkan di Modern Islamic School, adapun SMA di SMA Muhammadiyah C.

Satu kelebihan yang dimiliki Abdullah Sungkar adalah, ia sangat cerdas dan tekun dalam belajar. Dengan kelebihan itu, AS dapat menguasai dua bahasa asing - Arab dan Inggris - dengan sangat baik. Karenanya walaupun setelah lulus SMA tidak sempat melanjutkan ke perguruan tinggi karena faktor biaya, AS dapat belajar agama secara otodidak.

2. Pemuda Abdullah Sungkar

Semangat muda Abdullah Sungkar yang diilhami keimanan yang kuat kepada Allah, mendorongnya untuk menempa diri berkiprah di gelanggang perjuangan Islam. Untuk itu ia mulai menempa diri pada organisasi kepemudaan. Pertama-pertama bergabung dengan Kepanduan Al Irsyad, kemudian Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII). Sedang dalam politik praktis Abdullah Sungkar menjadi anggota partai Masyumi.

Walaupun AS sangat berkepentingan terhadap pelaksanaan syari'ah Islam, ia tidak memperjuangkan secara langsung lewat partai. Ia memang menjadi anggota partai Masyumi akan tetapi bukan pada level elit yang beradu argumentasi di parlemen. AS memilih jalur lain, yaitu berdakwah.

Untuk memperluas jangkauan dakwahnya, AS bersama kawan-kawannya mendirikan Radio Dakwah Islamiyah (Radis) di Jalan Gading Solo. Akan tetapi karena pemerintah menilai radio tersebut menyiarkan pesan-pesan agama yang dianggap membahayakan negara, maka pemerintah membungkamnya. Di samping itu, AS juga memiliki forum pengajian yang

dilaksanakan di Masjid Agung Solo. Bermula dari kuliah zhuhur di serambi masjid itulah, AS bersama lima kawannya mensepakati didirikannya sebuah pondok pesantren. Pondok yang bernama Al Mukmin ini merupakan salah satu wadah pengkaderan generasi muda Islam untuk mencapai cita-cita, *'izzu al-Islâm wa al-Muslimîn*.

3. Hijrah ke Malaysia

Tuntutan jaksa Pengadilan Negeri Sukoharjo 12 tahun untuk terdakwa kasus subversi Abdullah Sungkar² hanya diputuskan majlis hakim 9 tahun; tetapi setelah AS mengajukan banding, akhirnya diperingan menjadi 3 tahun sepuluh bulan, karena itu pada tahun 1982 AS dibebaskan.

Keluar dari penjara bukannya berhenti melakukan dakwah yang "menyinggung" pemerintah, bahkan ia semakin keras dalam mengkritik penguasa Orde Baru, apalagi tahun 1982-1985, ada dua peristiwa yang sangat menggetirkan umat Islam, yaitu 'pembantaian' Tanjung Priok dan pengasastunggalan Pancasila.

Memperhatikan sepak terjang AS tersebut, penguasa Orde Baru berusaha mengembalikan AS ke terali besi penjara. Modus yang dipakai adalah kejaksaan melakukan kasasi atas putusan banding Abdullah Sungkar. Dalam masa-masa krisis tersebut AS bertemu dengan beberapa ulama dari Timur Tengah di Jakarta, para ulama itu memberikan nasehat agar AS memilih di antara dua, pertama tetap tinggal saja di rumah tidak usah memenuhi panggilan aparat atau kalau tidak, melakukan hijrah ke sebuah negara yang dirasa lebih aman, akhirnya pilihan kedua diambil AS.³

Tahun 1985 di komplek pesantren Al Mukmin Ngruki Solo, di pagi-pagi buta puluhan tentara menggeledah rumah AS dan lingkungan sekitar, akan tetapi tidak ditemukan orang yang dicari, sebab malam harinya AS telah meninggalkan rumah untuk kemudian hijrah ke Malaysia. Di negeri jiran itu Abdullah Sungkar berganti nama dengan Abdul Halim, ia tinggal di kampung Air Bong, Serting Tengah, Batu Ulin, Negeri Sembilan.

Di tempat tinggal baru tersebut, jiwa AS sebagai seorang da'i selalu terpanggil untuk menyiarkan agama, karena itu walaupun dihimbau oleh banyak orang, agar untuk sementara menghentikan kegiatan dakwahnya demi kemananan, AS tidak memghiraukan. AS bahkan sempat mendirikan sebuah pesantren yang diberi nama "Ma'had Tarbiyah Islamiyah Luqman al Hakim" di Johor Malaysia.

²Tuntutan jaksa Roejito dibacakan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, tanggal 6 Maret 1982.

³Majalah *Suara Hidayatullah*, edisi 8/TH XII, Desember 1999.

Lengsernya Soeharto dari kursi presiden membawa harapan baru bagi Abdullah Sungkar, karena itu pada tahun 1999 AS memberanikan diri berkunjung ke Indonesia untuk berziarah ke berapa kawan seperjuangan, tetapi ia mendadak terserang gangguan jantung. akhirnya pada bulan Oktober tahun yang sama, setelah melakukan shalat zhuhur yang dijamak ashar, AS dipanggil menghadap Allah swt.

C. Wacana Pemikiran Politik Abdullah Sungkar

Terdapat tiga wacana politik yang sangat dominan pada diri Abdullah Sungkar, ketiga wacana inilah yang mewarnai Abdullah Sungkar dalam pergerakan dakwah maupun politik sampai akhir hayatnya. *Pertama*, konsepsi tentang nasionalisme atau kebangsaan; *kedua*, masalah demokrasi; dan *ketiga*, seputar pelaksanaan syari'ah atau hukum Islam dalam negara. Ketiga wacana di atas sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang tauhid yang kental. Oleh karena itu sebelum mengulas secara panjang lebar terhadap ketiga wacana politik tersebut terlebih dahulu penulis akan mengawali kajian seputar persoalan tauhid .

1. Tauhid sebagai paradigma

Untuk lebih memperjelas bagaimana pemahaman Abdullah Sungkar tentang tauhid, ada baiknya apabila dikaji beberapa kitab yang sering menjadi rujukan AS dalam berbagai ceramahnya. Paling tidak terdapat dua kitab yang sering menjadi acuan Abdullah Sungkar dalam masalah tauhid, yaitu: (1) *at-Tibyân Syarh Nawaqidh al-Islâm li al-Imâm Mujaddid Syeikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab*, karya Sulaiman bin Nashir bin Abdullah al-Ulwan; dan (2) *al-Wala' wa Al-Bara' fi al-Islâm*, karya Muhammad Sa'id Al Qahthani.

Kitab pertama berisi tentang sepuluh perkara yang membatalkan tauhid seseorang.⁴ Kalau dalam proses pengadilan kita mengenal apa yang dinamakan pembuktian terbalik, di mana terdakwa dinyatakan salah, apabila

⁴Kesepuluh perkara tersebut, yaitu: (1) syirik dalam beribadah kepada Allah; (2) membuat perantara antara dirinya dengan Allah; (3) tidak mengafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka; (4) meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi saw, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum beliau; (5) membenci ajaran yang dibawa Rasul saw.; (6) sihir, baik melakukannya maupun minta pertolongan kepada tukang sihir; (7) tolong-menolong dengan kaum musyrikin atau membantu mereka dalam menghadapi kaum muslimin; (8) meyakini bahwa ada sebagian manusia yang mempunyai kebebasan keluar dari syari'at Muhammad saw.; (9) memperolok-olok ajaran Rasul; dan (10) berpaling dari dinullah, maksudnya adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang dengannya seorang menjadi muslim sekalipun ia tetap tidak tahu tentang ajaran-ajaran yang bersifat rinci. Lihat Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al Ulwan, 1999, *Muhammad bin Abdul Wahab, Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman*, Abu Sayyid Sayyaf (pent), Solo : At Tibyan.

tidak dapat membuktikan bahwa dirinya benar, maka dalam kitab ini disebutkan bahwa seseorang yang telah mengucapkan dua kalimah syahadat divonis telah keluar dari Islam atau telah batal tauhidnya apabila terbukti mengamalkan salah satu di antara sepuluh perkara dimaksud. Dengan kata lain, kitab ini menyuguhkan kepada pembaca bagaimana bertauhid yang benar dengan cara memaparkan hal-hal kebalikannya. Tentang keistimewaan kitab ini Abdullah Sungkar mengatakan :

...ini ditulis kembali oleh Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al Ulwan, diedit dari buku karangan Syaikh al-Islam al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ini buku Wahabi asli, kalau kita menolak keterangan-keterangan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita sesat, sebab beliau itu mengajarkan ilmu yang benar dengan segala tantangannya yang beliau hadapi.⁵

Kitab kedua, yaitu *al-Wala' wa al-Bara' fi al-Islâm*, secara garis besar menerangkan, bahwa tauhid seseorang itu baru benar apabila ia memberikan loyalitasnya hanya untuk Allah kemudian berlepas diri dari selain-Nya. Ketika ketaatan seorang mukmin hanya tertuju kepada Allah semata, maka secara otomatis ia akan bersikap sebaliknya kepada orang atau sekelompok orang yang bersebarangan dengan "kepentingan" Allah. Di sinilah letak gesekan kepentingan terjadi, penguasa dunia (presiden, raja, perdana menteri dan lain-lain) yang menuntut ketaatan rakyatnya, akan kecele bila tidak sejalan dengan aturan Allah.⁶

Dalam berbagai ceramahnya Abdullah Sungkar jarang membahas secara khusus tema-tema politik tertentu. Ia lebih banyak mengulas seputar persoalan aqidah atau tauhid, sebab persoalan inilah yang menjadi pangkal segala sesuatu. Seseorang akan mengalami keterpurukan ataupun kesuksesan hidup juga berawal dari persoalan ini, karenanya Abdullah Sungkar sangat menekankan kemurnian aqidah dari anasir-anasir syirik. Dalam rangka menerangkan pemahaman aqidah atau tauhid yang lurus, Abdullah Sungkar banyak mengemukakan pemikiran-pemikiran politiknya, termasuk menyampaikan contoh-contoh atau kasus-kasus politik aktual. Karena itu pemikiran politik Abdullah Sungkar *integrated* dengan pemahamannya akan tauhid. Di samping itu, pemikiran-pemikiran politik tersebut tidak diuraikannya secara sistematis, tetapi hanya sporadis pada ceramah-ceramahnya yang berserakan.

⁵Ceramah Abdullah Sungkar di Cheras Malaysia, tanggal 19 Oktober 1998.

⁶Muhammad bin Sa'id bin Salim Al Qahtani, 1993, *Al Walak wa al Barak, Loyalitas Muslim terhadap Islam, Pemahaman Aqidah Salkaf*, Kathur Suhardi (pent), Solo : Ramdhani.

2. Wacana tentang Nasionalisme

Di Indonesia paham nasionalisme muncul pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya organisasi Budi Utomo tahun 1908 dan mencapai puncaknya pada ikrar sumpah pemuda yang di bacakan pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan berbahasa satu bahasa satu bahasa Indonesia.

Ikrar sumpah pemuda tersebut terjadi, karena adanya kesamaan nasib di antara para pejuang dalam melawan penjajah Belanda, meski secara prinsipil terjadi polarisasi antara para pejuang, yaitu mereka yang sekuler (nasionalis) dan Islam. Sukarno sebagai representasi kaum nasionalis sekuler dalam pidato-pidato dan tulisannya sering mengatakan, bahwa rakyat perlu mencintai "Ibu Indonesia" yang melahirkan pahlawan-pahlawan seperti Gajah Mada dan tokoh-tokoh lain pada zaman Hindu. Di samping itu, ia juga mendorong masyarakat agar mencintai tanah air dan memuliakannya. Semua itu dalam rangka membangkitkan perasaan patriotik rakyat Indonesia.

Terhadap pandangan Sukarno tersebut kalangan Islam memberikan tanggapan serius. Misalnya Agus Salim menilai, bahwa pengagungan terhadap bangsa secara berlebihan akan menyengsarakan bangsa itu sendiri dan bangsa lain, seperti yang terjadi pada bangsa-bangsa Eropa. Mereka karena saking cintanya terhadap bangsanya menyebabkan bangsa-bangsa lain seperti Indonesia menderita akibat kolonialisasi. Bahkan Agus Salim mengatakan, bahwa cinta bangsa yang seperti disampaikan Sukarno telah menjadikan bangsa sebagai berhalah.⁷ Tanggapan yang tidak kalah kerasnya datang dari A. Hasan, pemimpin Persatuan Islam (Persis). Nasionalisme atau faham kebangsaan yang disampaikan Sukarno menurut Hasan, tak ubahnya *ashabiyah* seperti pada zaman jahiliyah pra Islam. Ia mengutip sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, bahwa mendirikan perkumpulan kebangsaan, mengajak orang kepada kebangsaan, menolong partai kebangsaan itu dilarang oleh Islam.⁹

Polarisasi antara kedua kelompok di atas berlangsung terus baik menjelang maupun awal kemerdekaan, zaman Orde Lama juga era Orde Baru. Sesekali antara keduanya terjadi benturan keras, sebab pihak Islam

⁷Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju di dalam satu kesatuan Bangsa. Lihat, *Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 1990, Jakarta : Cipta Adi Pustaka, hal. 31.

⁸Deliar Noer, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, hal. 268.

⁹Akh. Minhaji, 1997, *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Montreal : Institut of Islamic Studies Mc. Gill University, hal. 257.

hampir selalu berada di luar negara sementara kelompok nasionalis lebih banyak memegang kendali pemerintahan.

Abdullah Sungkar yang menjadi aktifis pergerakan Islam era Orde baru dalam memahami konsep nasionalisme tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Agus Salim dan A. Hasan, yaitu menghadapkan sebuah pemikiran dengan firman Allah atau Hadits Nabi. Dalam salah satu ceramahnya ia mengatakan :

Saya beri contoh. Negeri ini adalah negara Indonesia, kami adalah bangsa Indonesia, oleh karena negara Indonesia ini adalah milik bangsa Indonesia, maka tidak ada yang boleh mengatur negara Indonesia kecuali bangsa Indonesia. Itu faham nasionalis begitu. Coba kita selidiki formulasi atau kalimat-kalimat yang ada di situ, benar ndak? Apa benar itu, bahwa negara Indonesia ini miliknya bangsa Indonesia? Menurut faham Islam, ayat kursi itu sajalah yang sering kita baca, wong kita kalau mbaca ayat kursi hanya dicari barokahnya saja tidak mau memahami isinya. Lahu mâ fi al samâwâti wamâ fi al-ardh. Kepunyaan-Nya apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Bumi ini, the earth ini semuanya kepunyaan Allah. Bumi ini namanya Indonesia karena kebetulan terletak antara Melanesia dan India maka dinamakan Indonesia.¹⁰

Tauhid yang benar menurut Abdullah Sungkar berarti mengesakan Allah dalam segala hal, pengabdian, pencintaan, penghormatan, pengorbanan dan lain-lain. Meyakini bahwa negara Indonesia adalah milik bangsa Indonesia berarti telah merusak Tauhid Rububiyah seorang Mu'min, sebab pada hakekatnya Allahlah empunya segala makhluk, termasuk negara Indonesia dan penghuninya. Abdullah Sungkar juga sangat menentang lambang-lambang negara atau nyanyian, yang menjurus kepada kemusyrikan dan dapat merusak tauhid seorang Mu'min. Seperti dalam mensikapi lagu wajib Bagimu Negeri yang sering dipakai untuk menunjukkan patriotisme seorang warga negara, ia katakan :

... tapi aneh, si muslim yang pada waktu shalat subuh setengah lima pagi masih inna shalâti wanusuki wamahyâya wamamâti lillâhi rabbil 'âlamîn. Jam tujuh itu sudah berubah, jam tujuh pagi. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdikan, bagimu negeri jiwa raga kami. Coba bayangkan saudara-saudara sekalian. Itu disekolah Al Irsyad juga diajarkan, di Muhammadiyah juga. Nada lagunya jelas lagu gerejani, wong itu yang ngarang komponis Kristen murni. Kemudian syairnya musyrik asli. Saudara-saudara sekalian. Coba yang musyrik yang bagaimana lagi kalau bukan yang begitu? Kalau muslim jelas, pada-Mu Allah kami berjanji, pada-Mu Allah kami berbakti, pada-Mu Allah kami mengabdikan, bagi-Mu Allah jiwa raga kami.¹¹

¹⁰Ceramah Abdullah Sungkar sebelum hijrah ke Malaysia, tanpa keterangan waktu dan tempat.

¹¹*Ibid.*

Menurut Abdullah Sungkar, paham Nasionalisme akan merusak tauhid seorang Mu'min. Meyakini kepemilikan negara Indonesia oleh sekelompok manusia yang bernama bangsa Indonesia, berarti memberi kebebasan pemiliknya untuk berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Inilah sebabnya hukum Allah, si pemilik yang sebenarnya tidak dipakai untuk mengatur warga negara tersebut. Karena itu selanjutnya Abdullah Sungkar mengatakan :

Faham nasionalisme ini dijawab oleh Allah dalam Surat al-Fâthir : 15 "Yâ ayyuha al-nâsu antum al-fuqarâi ilallâh, wallâhu huwa al-ghoniyyu al-hamid" (Hai manusia kamu semua itu melarat butuh kepada Allah dan Allahlah yang Maha kaya lagi terpuji)...Jadi kita ini fakir saudara-saudara sekalian di hadapan Allah. Kita ini sekarang kecolongan banyak sekali oleh faham-faham yang merusak tauhid kita. Padamu Allah jadi padamu negeri dan kita ikut-ikutan saja, latah, maunya orang begitu lalu kita ikut-ikutan.¹²

Di balik penolakan Abdullah Sungkar terhadap faham Nasionalisme, ternyata ia lebih cenderung kepada konsep khilafisme dalam politik Islam,¹³ yaitu sebuah negara universal, ekstrateritorial dan supranasional, yang tidak dibangun berdasarkan loyalitas regional, rasial atau kelompok tertentu. Ia lebih merupakan komunitas universal yang diikat oleh tauhid dan ukhuwah Islamiyah, dengan ka'bah sebagai pusat perhatian pikiran dan penglihatan. Kekuasaan khilafah Islam terakhir ada di tangan Turki Utsmani. Oleh Mustafa Kamal Attaturk, Turki yang awalnya berbentuk khilafah dan menguasai wilayah yang amat luas, direformasi menjadi sebuah republik yang hanya menguasai daerah di seputar Asia kecil dan sedikit Eropa. Konsep politik khilafah ini pernah diupayakan bangkit kembali oleh Rasyid Ridha pada tahun 1926 yaitu dengan menyelenggarakan kongres umat Islam se dunia, tetapi gagal.

Menurut Abdullah Sungkar Islam hanya akan bisa terhormat apabila khilafah Islam dapat ditegakkan. Saat ini, menurutnya, beratus jama'ah sedang mempersiapkan diri di banyak negara. Nanti pada waktunya, apabila telah terbentuk daulah-daulah Islamiyah (negara-negara Islam) di masing-masing negara, para pemimpinnya akan mengadakan konferensi untuk membentuk khilafah Islam yang telah lama hilang.¹⁴

3. Wacana tentang Demokrasi

Tidak ada jargon politik yang paling banyak dibicarakan, dituntut dan diperdebatkan melebihi demokrasi. Ada tiga derivasi demokrasi yaitu,

¹² *Ibid.*

¹³ Cemah Abdullah Sungkar di Malaysia, tanpa keterangan waktu.

¹⁴ *Ibid.*

kedaulatan rakyat, kebebasan dan keadilan secara operasional, masing-masing aspek tersebut tidak sama penerapannya dalam setiap negara, tetapi pada prinsipnya mereka sepakat bahwa demokratisasi merupakan sistem yang paling dapat diterima dunia. Mereka dapat merasa puas karena itu ketika masuk ke dunia Islam mengalami proses dialektika yang sangat dinamis. Survei terhadap pandangan tokoh-tokoh Islam tentang demokrasi, menunjukkan keberagaman pemahaman konsep tersebut, mulai dari yang secara apriori menolak hingga yang sangat akomodatif. Abu Al Maududi misalnya, sangat menolak konsep kedaulatan rakyat karena hal itu bententangan dengan agama Islam. Dalam Islam, kedaulatan itu ada di tangan Tuhan (*sovereignty of God*).¹⁶ Dalam praktiknya demokrasi yang sangat dijunjung tinggi negara-negara Barat itu, ternyata hanya sekelompok elit politik, secara oligarki menguasai negara. Mereka atas nama rakyat mengelola negara semestara rakyat hanya diberi hak lima tahun sekali untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Maududi nampaknya paham betul bagaimana perilaku politik para penguasa yang memaki demokrasi sebagai sistem politiknya, apalagi di era modern, di mana bentuk-bentuk propaganda dapat dilakukan dengan canggih, rakyat dapat saja dibayar terpukau sehingga memilih para pemimpin itu sebagai wakilnya. Yang terjadi di negara-negara sosialis, lebih parah lagi, atas nama kaum proletar mereka memimpin rakyat secara dikatoral.

Sementara itu pada sisi yang lain, Razul Rahman melihat demokrasi sebagai alternatif terbaik dalam sistem politik Islam. Sarjana yang terpaksa meninggalkan negaranya sendiri, Pakistannya ini, mengelaborasi tema demokrasi dari prinsip Syura dalam al-Qur'an. Manurungnya praktik-praktik demokratis sebagai implementasi Syura, sudah dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat. Masalahnya ketika perangnya Uhud, karena merupakan hasil kesepakatan, bahwa sebagian pasukan harus mengikatkan diri untuk tidak melakukan gyalapun akhirnya kaum Muslimin mengalami kekalahan. Pada posisi itulah pertanyaan al-Qur'an untuk bertawakal setelah bertawakal dilakukan. Adapun para sahabat, melakukan praktik yang sangat demokratis saat pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah sepeninggal rasul. Meskipun ada beberapa sahabat tidak menyetujui hasilnya, tetapi saja kepemimpinan Abu Bakar dipertahankan, sebab sudah melalui musyawarah yang sangat

¹⁵Gus Dur dalam Ahmad Amir Azis, 1999, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Gus Dur*, Jakarta: Rineka, hal. 65.
¹⁶Abul Ala Al Maududi, 1996, *Khilafah dan Kerajaan—Evaluasi—Kritik—atas—Sejarah Pemerintahan Islam*, M. Al Baqir (pent.), Bandung: Mizan, hal. 35.
¹⁷Fazlu Rahman dalam Ahmad Syafi'i Maarif, 1985, *Studi tentang Pergerakan dalam Majelis Konstituante, Islam dan masalah Keneagaan*, Jakarta: LP3ES, hal. 50.

demokratis. Dengan dua contoh tersebut, Rahman yakin bahwa demokrasi walaupun berasal dari Barat adalah sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Di antara dua kutub tersebut, terdapat Iqbal yang secara prinsipil menerima konsep demokrasi tetapi perlu sedikit koreksi sehingga tidak seperti demokrasi yang berjalan di Barat. Umat Islam perlu demokrasi tetapi demokrasi yang sarat dengan nilai-nilai spiritual. Sayang Iqbal sebelum merinci gagasannya bagaimana konsep itu dipraktekkan, keburu meninggalkan dunia.¹⁸

Dalam pada itu Abdullah Sungkar dapat dikatakan mengalami dualisme pemahaman terhadap konsep demokrasi. Pada satu sisi ia sering mengecam pendapat orang banyak, sebagai sebuah bentuk kedaulatan rakyat, seperti yang ia katakan :

*Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah karena kebanyakan mereka itu hanya mengikuti sangka-sangka, nggak ada ilmu, ya hanya persangkaan-persangkaan.*¹⁹

Seperti pada kesempatan-kesempatan lain, Abdullah Sungkar sering merespon sesuatu, dengan jawaban yang “pasti”, yaitu mengutip kitab suci. Dalam masalah kedaulatan rakyat ini misalnya:

*... masyarakat itu kebanyakan orang, dan kebanyakan orang itu mesti mengarahkan kepada yang tidak Islam, nggak ada aktsaru al-nâsi yu'minûn, itu ndak ada. Aktsaru al-nâsi mesti la yu'minûn, aktsaru al-nâsi bi haqqihi kârihûn, aktsaru al-nâsi la yasykurûn..*²⁰

Nampaknya kekhawatiran Abdullah Sungkar terhadap demokrasi ala Barat yang mendasarkan keputusan atau kebijakan pada kehendak orang banyak, seperti halnya Iqbal ketika mengkhawatirkan keadaan yang sama. Hanya saja Iqbal memberikan alternatif sedangkan Abdullah Sungkar tidak. Baginya, kalau demokrasi itu identik dengan menyerahkan urusan kepada kehendak kebanyakan orang, maka secara tegas ditentangnya. Dengan mengutip ayat al-Qur'ân, justru kelompok berjumlah sedikitlah yang seringkali berjalan pada posisi yang benar, “*Kalau wa qalîl pasti yang illa alladzîna âmanu wa'amîlu al-shâlihât, wama amana ma'ahu illa qalîl, waqalîlun min 'ibâdih al-syakûr*”.

Adapun tentang kebebasan di mana menjadi turunan lain dari prinsip demokrasi, Abdullah Sungkar bersikap lain. Seperti saat mengomentari

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Ceramah Abdullah Sungkar sebelum hijrah ke Malaysia, tanpa keterangan tempat dan waktu.

²⁰*Ibid.*

keinginan presiden Soeharto yang akan membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat Pancasila.

Saya katakan itu hak beliau sebagai seorang warga negara Indonesia untuk mewarnai masyarakat Indonesia dengan keyakinan yang beliau yakini. Tapi saya sebagai seorang warga negara yang lain, yang Abdullah Sungkar ini akan bertekad membangun masyarakat Indonesia yang sembilan puluh persen beragama Islam berdasarkan Islam murni sesuai al-Qur'an dan Sunnah. Dan di dalam suatu demokrasi, dalam suatu negara demokrasi perbedaan itu wajar saudara-saudara sekalian, justru kompetisi di dalam mewarnai masyarakat itulah yang akan menghidupkan dinamisme di dalam bangsa ini. Sebaliknya, kalau semuanya itu harus monoton, harus ikut satu orang, kita jadi bebek semua jadinya. ABS asal bapak senang semua, masa Bangsa Indonesia akan dijadikan bebek semuanya, tentunya tidak. Bangsa Indonesia Bangsa yang hidup, bangsa yang majemuk.²¹

Kecenderungan Abdullah Sungkar menerima prinsip kebebasan ini diperkuat dengan mengutip hasil kongres International Commission of Jurist tahun 1955, bahwa syarat minimal tegaknya demokrasi adalah dipenuhinya kondisi-kondisi berikut:²²

(1) terjaminnya kemanan pribadi. Tidak ada seorangpun yang dapat ditahan atau dipenjara tanpa proses pengadilan; (2) setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, baik lewat media massa atau media lain; (3) kehidupan pribadi seseorang harus dijamin. Surat-surat pribadi mesti dijamin kerahasiannya dan tak seorangpun dapat dituntut karena pendapatnya dalam sebuah korespondensi; (4) kebebasan beragama harus dijamin. Setiap kepercayaan yang diakui harus dihormati dengan syarat kepentingan umum dan moral tidak dilanggar; (5) hak untuk mendapatkan pengajaran harus dijamin tanpa ada diskriminasi; (6) setiap orang bebas untuk berkumpul dan berserikat dan terlebih bebas memilih menjadi anggota partai yang ia sukai; (7) pengadilan harus bebas dari pengaruh manapun; hakim bertindak independen; dan (8) negara tidak bisa bertindak diskriminatif kepada rakyat karena ras, kulit atau partai politik.

4. Wacana tentang penegakan Hukum Islam (Syariat)

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara yang diatur atas kekuasaan semata. Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD empat lima, "... maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam UUD Negara Indonesia". Dan dalam penjelasan UUD disebutkan, bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum.

Masalahnya adalah undang-undang yang bagaimana, hukum positif yang bersumber dari hasil kreasi manusia atau hukum Islam dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi? Tentu yang pertamalah yang berlaku, karena sejak awal

²¹ *Ibid.*

²² Pembelaan Abdullah Sungkar dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sukoharjo tahun 1982

berdirinya negara RI tarik menarik terhadap Piagam Jakarta yang memuat diberlakukannya syari'at, dimenangkan kelompok nasionalis. Meskipun demikian, sebenarnya kalau mengikuti tafsiran Muh. Hatta tentang Pancasila, bisa saja arah hukum Indonesia diselaraskan dengan hukum Islam. Menurut Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi sila pertama Pancasila tidak lain adalah tauhid, dan sila itu harus menjadi inspirasi sila-sila yang lain dan sistem yurisprudensi negara RI.

Persoalan pembuat hukum tidak lepas dari pemahaman tentang siapa yang berdaulat dalam sebuah negara. Negara yang menganut demokrasi sekuler meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, maka kekuasaan penentu hukum ada di tangan rakyat yang biasanya diwakili oleh sekelompok masyarakat yang dianggap mampu (parlemen). Adapun Abdullah Sungkar yang menolak konsep kedaulatan rakyat, hukum yang mesti diberlakukan dalam sebuah negara adalah hukum Islam, karena pada hakekatnya hanya Allahlah yang berhak membuat undang-undang, sedangkan manusia, apapun status dan keahliannya tidak ada kewenangan, kecuali pada peraturan yang sifatnya tidak prinsipil, seperti peraturan tentang lalu lintas. Adapun yang bersifat prinsip manusia yang membuat hukum berarti telah menyamakan dirinya sama kedudukan dengan Allah, dan itu adalah perbuatan syirik.²³

Syirik itu ialah merupakan sesuatu yang mempersamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Sesuatu sifat yang merupakan hak istimewa Allah dipersamakan dengan makhluk, satu contoh misalnya khutbah malam ini saya terangkan, Al Tasyri' itu adalah hak membuat undang-undang, membuat hukum, ini banyak yang ndak tahu... haqqu al-Tasyri', hak istimewa Allah yang tidak boleh diketahui oleh siapapun juga, ndak boleh disaingi oleh siapapun juga dalam hak membuat undang-undang, ndak boleh orang lain membuat undang-undang.²⁴

Lebih lanjut, tentang Pancasila yang pada masa Orde Baru didengungkan di berbagai forum bahwa ia sebagai sumber dari segala sumber hukum, Abdullah Sungkar juga menentangnya.

Kalimat sumber dari segala sumber hukum menurut iman dan ajaran Islam adalah hanya bagi Allah saja, maka meyakini selain Allah termasuk Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah keyakinan yang menyekutukan Allah (syirik). Dan menyekutukan Allah itu menurut firman Allah dan sabda Nabi Muhammad saw. adalah berakibat sangat membahayakan kehidupan seorang muslim di akherat kelak...²⁵

²³Ceramah Abdullah Sungkar sebelum hijrah ke Malaysia, tanpa keterangan tempat dan waktu.

²⁴*Ibid.*

²⁵Abdullah Sungkar, Pembelaan di persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penegakan hukum Islam dalam sebuah negara tidak lain dalam rangka memenuhi seruan Allah, bahwa umat Islam harus berislam secara totalitas, dalam segala aspek kehidupan termasuk bernegara, kalau tidak berarti seseorang telah beriman kepada sebagian ayat Allah dan mengkafiri sebagian yang lain.

*... itu namanya *yu'minu bi ba'dhihin wa yakfuru bi ba'dhin*, percaya sebagian tetapi kafir sebagiannya. Kalau dalam masalah politik saya makai *Qur'an*. Di sini ada seseorang yang mengatakan, bahwa hendak buat partai jangan pakai nama Islam, kalau mengatur ekonomi jangan pakai Islam, kalau mengatur masjid pakai Islam, mengatur ekonomi tidak, mengatur surau pakai Islam. Itu namanya mengimani sebagian dan mengkafiri sebagian, jangan sampai kita seperti itu.²⁶*

Bagi Abdullah Sungkar persoalan penegakan Syari'at Islam adalah masalah yang sangat prinsip. Meskipun demikian, sebenarnya ia tidak peduli siapa yang akan melaksanakan agenda penting itu. Baginya siapapun yang betul-betul paham syari'at dan melaksanakannya, akan didukung dan ditaati, termasuk kepada penguasa Orde Baru.

*... kita harus menarik garis tegas, kemudian kita berangkat. Coba sekarang ini orang-orang yang memimpin kita secara resmi, mereka itu memahami syari'at atau bodoh tentang syari'at? itu dulu. Coba mari kita pikirkan, paham syari'at atau tidak? Kalau jawabannya mereka itu orang-orang alim tentang syari'at, mengetahui syari'at kemudian memimpin dengan syari'at itu, wajib atas taat kita pada mereka. Ya, harus ada garis yang tegas. Kalau mereka itu kesimpulan kita, akal pikiran kita hati kita, menurut kesimpulan yang obyektif, bahwa mereka itu adalah orang yang tidak mengerti syari'at dan tidak memimpin kita dengan syari'at maka Allah melarang, "*fala tattabi' bahwa "alladzina la ya'lamun"*, jangan kamu ikuti keinginan-keinginan orang-orang yang tidak mengerti syari'at, karena keinginan itu tidak lain hanya akan menjerumuskan kamu kepada siksa Allah.²⁷*

Walaupun di berbagai ceramahnya Abdullah Sungkar secara tegas menolak hukum yang selama ini berjalan di Indonesia dan mendambakan ditegakkannya hukum Islam, ia tidak memerinci secara detil bagaimana hukum Islam itu ditegakkan. Ada kesan, bahwa yang penting syari'ah ditegakkan dulu, adapun perangkat-perangkat hukum yang lain bisa dipikirkan belakangan. Dengan kata lain, Abdullah Sungkar pada persoalan ini bicara pada tataran normatif-doktriner, bahwa hukum itu milik Allah, manusia tinggal melaksanakan. Kelebihan pada cara seperti ini, persoalan hukum yang di mata praktisi begitu rumit dan berbelit menjadi nampak sangat sederhana dan mudah.

²⁶Abdullah Sungkar, *ibid.*

²⁷*Ibid.*

D. Penutup

Pemikiran politik Ustadz Abdullah Sungkar, baik masalah nasionalisme, demokrasi maupun penegakan syari'ah Islam sangat dipengaruhi cara pemahamannya terhadap teks kitab suci yang literalistik. Cara pemahaman semacam ini di satu sisi menjadikan al-Qur'ân sebagai sebuah teks yang sangat mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan, tetapi pada saat yang sama cara ini cenderung *rigid* bahkan tanpa kompromi. Dengan kata lain literalisme dalam memahami al-Qur'ân itu semacam hubungan arus pendek antara teks kitab suci dengan kehidupan.

Sebagai sebuah wacana, pemikiran semacam ini sah-sah saja dilakukan, apalagi Indonesia telah memproklamirkan diri sebagai negara yang menganut demokrasi, di mana kebebasan berpendapat merupakan ciri utamanya. Karena itu membendung arus penegakan syari'ah Islam yang dilakukan dengan tangan besi merupakan langkah yang kontraproduktif. Penindasan terhadap suatu kelompok yang memiliki ideologi perjuangan tertentu, hanya akan membuat kelompok itu bertindak radikal. Biarlah mekanisme pasar ideologi berjalan secara alami di masyarakat. Karena dengan cara inilah demokrasi dapat ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, Ahmad Amir, 1999, *Neo-Modernisme Islam di Indonesia, Gagasan Sentral Nurcholish Madjid dan Gus Dur*, Jakarta: Rineka.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia*, 1990, Jakarta : Cipta Adi Pustaka.
- Maarif, Ahmad Syafii, 1985, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Majelis Konstituante*, Jakarta: LP3ES.
- Maududi, Abul 'Ala Al, 1996, *Khilafah dan Kerajaan, Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, M. Al Baqir (pent.), Bandung: Mizan.
- Minhaji, Akh., 1997, *Ahmad Hasan and Islamic Legal Reform in Indonesia (1887-1958)*, Montreal : Institut of Islamic Studies Mc. Gill University.
- Noer, Deliar, 1980, *Gerakan Moden Islam di Indoensia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.

Noer, Deliar, 1980, *Gerakan Moden Islam di Indoensia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES.

Qahthani, Muhammad bin Sa'id bin Salim Al, 1993, *al Walak wa al Barak, Loyalitas Muslim terhadap Islam, Pemahaman Aqidah Salaf*, Kathur Suhardi (pent), Solo: Ramdhani.

Suara Hidayatullah, edisi 8/TH XII, Desember 1999.

Ulwan, Sulaiman bin Nashir bin Abdullah Al, 1999, *Muhammad bin Abdul Wahab, Penjelasan Tentang Pembatal Keislaman*, Abu Sayyid Sayyaf (pent), Solo : At Tibyan.